



GANDENG OMBUDSMAN UNTUK TRANSPARANSI Program Kotaku Bergulir Hingga 2021

YOGYA (KR) - Kawasan kumuh ditarget mencapai 0 persen hingga akhir tahun ini. Meski demikian, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat masih akan tetap digulirkan hingga tahun 2021.

Tenaga Ahli Financing Institutional and Colaboration Program Kotaku, Sudarisman, mengungkapkan terdapat tujuh indikator kawasan kumuh yang ditetapkan pemerintah pusat. Di antaranya bangunan, jalan, drainase, air minum, limbah, sampah hingga penanganan kebakaran. "Dari tujuh indikator itu jika diskoring hasilnya berada di bawah 19, maka dinyatakan kawasan kumuh sudah mencapai nol persen," jelasnya di sela penandatanganan kesepakatan bersama dengan Lembaga Ombudsman (LO) DIY, Rabu (28/8).

Oleh karena itu, meski target nasional pengentasan kawasan kumuh di akhir tahun ini bisa nol persen, namun ada beberapa indikator yang perlu penguatan. Sehingga pada tahun 2020

dan 2021, sasaran program Kotaku akan memprioritaskan beberapa indikator yang masih lemah tersebut.

Sudarisman menambahkan, program Kotaku di DIY sudah digulirkan sejak 2015 di empat kabupaten dan kota, yakni Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogya. Hingga saat ini baru Kulonprogo yang sudah mampu mencapai target nol persen.

"Tahun ini Kotaku menyasar Kota Yogya dan Sleman. Masing-masing mengelola Rp 17,5 miliar dan Rp 6 miliar. Jadi total dana Kotaku dari pemerintah pusat yang digulirkan di DIY tahun ini ada Rp 23 miliar," imbuhnya.

Terkait kerja sama dengan Lembaga Ombudsman (LO) DIY, Sub Complain Handling Unit Program

Kotaku, Carolina Widiarsari, menjelaskan ditujukan mengawal transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini lantaran dana yang dikelola dalam program Kotaku tidaklah sedikit. Dana itu ditransfer oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke rekening tiap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Selanjutnya, BKM yang berbasis kelurahan tersebut menggandeng masyarakat dalam mengelola anggaran.

"Lembaga Ombudsman ini nanti akan melakukan pendampingan secara langsung dan menjadi penengah ketika terjadi persoalan. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa laporan kebocoran namun relatif kecil. Makanya, peran ombudsman sangat kami harapkan agar persoalan itu bisa dise-



KR-Ardhi Wahdan

Penandatanganan kesepakatan bersama program Kotaku dengan LO DIY.

lesaikan di tingkat bawah," urainya.

Sementara itu, khusus di Kota Yogya sampai akhir tahun 2018 tersisa 69,04 hektare kawasan kumuh dan tersebar di 11 kelurahan. Pengentasan kawasan kumuh itu pun tidak hanya mengandalkan program Kotaku, melainkan berkolaborasi dengan kegiatan di daerah. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya yang memiliki kegiatan pengentasan kawasan kumuh.

Total anggaran yang dikelola DPUPKP Kota Yogya untuk pengentasan kawasan kumuh mencapai Rp 16,65 miliar. Masing-masing berasal dari APBD Kota Yogya sebesar Rp 10,6 miliar, dan bantuan DIY Rp 6,05 miliar. (Dhi)-g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005